

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yani (2008:51) PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Halim (2010:52) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah sesuai dengan memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sebagai mana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah tertentu.

2.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantung dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 10 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya PAD sendiri. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 06 Ayat 1 menjelaskan bahwa sumber-sumber PAD itu terdiri dari sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh suatu pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha yaitu pungutan suatu daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan tertentu yaitu pungutan suatu daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas perizinan tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah dan dimana kekayaan daerah tersebut dilepaskan dan dipertanggung jawabkan melalui Anggaran Blanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang dimaksud adalah suatu pendapatan dan dimana pendapatan-pendapatan tersebut yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan bahwa lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan Nilai Tukar Terhadap Mata Uang Asing
- e. Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2 Pajak

Pengertian Pajak Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemahamidjaja dalam Buku Ilyas (2011:06) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016:03)

Dari pengertian Pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari Rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak pada dasarnya pajak mempunyai fungsi, dalam buku Mardiasmo (2016:04) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak, diantaranya yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundanaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

2.2.3 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara. Teori tersebut terdiri dari:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang dikutip oleh Pohan (2014:44) mengemukakan 4(empat) asas pemungutan pajak yang disebut *Four Maxims/Four Canons* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality/Equity*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmati di bawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur.

Kepastian tersebut berarti:

- a. Harus pasti, siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak)
- b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (objek pajak)
- c. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tariff pajak (tariff pajak)
- d. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar (prosedur pajak)

3. *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan/memudahkan. Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*leving tax at sorce*) artinya pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, deviden, bunga deposito.

4. *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*). Bagi WP hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem untuk memungut pajak, sistem tersebut yaitu sebagai berikut (Ahman, 2007:53):

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan Wajib Pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.6 Jenis Pajak

Jenis Pajak dalam buku Mardiasmo (2016:07) dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Petambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: PPN dan PPnBM.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan, BPHTB.

2.3 Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribus wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Halim (2010:101) Pajak Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak untuk provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota.

Dari pengertian di atas bahwa, Pajak Daerah mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

2.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten Kota, terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 10 menjelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Ayat 11 menjelaskan

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 15 menjelaskan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan dalam pasal 01 Ayat 16 menjelaskan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 17 menjelaskan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan dalam Ayat 18 menjelaskan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 22 menjelaskan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan dalam Ayat 23 menjelaskan

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 29 menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 30 menjelaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan dalam Ayat 31 menjelaskan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 32 menjelaskan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan dalam Ayat 33 menjelaskan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 35 menjelaskan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan dalam Ayat 36 menjelaskan Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 37 menjelaskan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan dalam Ayat 38 menjelaskan Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* hage, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 01 Ayat 06 menjelaskan bahwa PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam

Ayat 07 dijelaskan bahwa bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten, sedangkan dalam ayat 8 dijelaskan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diketkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak atas BPHTB.

2.3.2 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
5. Pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari cukai rokok
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%

13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

2.4 Efektifitas

Menurut Mahmudi (2010:86) mendefinisikan efektifitas sebagai berikut:

“Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*”.

Analisis Efektifitas Pajak Daerah merupakan suatu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan suatu PAD yang direncanakan dengan perbandingan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah tersebut (Halim, 2010:135)

Berikut ini adalah Rumus Rasio untuk menghitung Efektifitas Pajak Daerah:

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, (2010:135)

Efektifitas Pajak Daerah terhadap PAD secara rasio dapat dikategorikan efektif apabila hasil perhitungan rasio efektifitas mencapai angka minimal 100% (seratus persen). Jika rasio efektifitas menunjukkan angka yang semakin efektif, maka semakin efektif pula penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Nilai intepretasi efektifitas penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Nilai Intepretasi Efektifitas

Presentase (%)	Kriteria Efektifitas
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, (2004:151)

2.5 Kontribusi

Menurut Guritno dalam Tiyasari (2010:21) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2004):

$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$
--

Sumber: Halim (2010:134)

Jika analisis kontribusi menunjukkan angka yang semakin meningkat, maka semakin besar pula kontribusi yang diperoleh dari pajak daerah terhadap PAD. Kontribusi dapat dikatakan baik apabila hasil perhitungan kontribusi menunjukkan angka >50%. Kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Nilai Intepretasi Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria Kontribusi
0.00 – 10	Sangat Kurang
10.10 – 20	Kurang
20.10 – 30	Sedang
30.10 – 40	Cukup Baik
40.10 – 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir (2004:149)

